

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Pemerintah harus melaksanakan sistem pengendalian dalam organisasi agar mendapatkan kinerja pemerintah yang baik dan dapat menciptakan *good government*.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran dari SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Laporan SAKIP Kabupaten OKI tanggal 19 Februari 2020 dari <https://www.detiksumsel.com/tag/pemkab-ogon-komering-ilir>, Pemerintah Kabupaten OKI melalui bagian organisasi Setda OKI menyelenggarakan sosialisasi SAKIP dan *Coaching Clinic* e-SAKIP untuk mewujudkan SAKIP Kabupaten OKI agar lebih baik lagi. Hal ini juga sehubungan dengan informasi sebelumnya mengenai Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tertanggal 25 Februari 2019 yang masih terlihat rendah (<https://www.bakup.kaboki.go.id/images/dokumen/SAKIP/2019/lhe.pdf>). Rendah, dalam artian masih membutuhkan perbaikan kualitas pengukuran kinerja dengan harapan tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian terfokus dan tidak meluas. Masalah yang diteliti adalah: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Setda di Kabupaten OKI tahun 2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Setda Kabupaten OKI.

1.4.2 **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan mengenai sistem pengendalian intern dan SAKIP pada Setda Kabupaten OKI.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah khususnya pada setda Kabupaten OKI.

3. Bagi Almamater

Dapat menambah kajian referensi sehubungan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pada setda Kabupaten OKI.